

HARIAN

MERDEKA

aspirasi rakyat



Bongkar Kasus Suap HGB Summarecon di BPN Bogor, KPK Geledah Kantor ATR/BPN

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (17/9/2026).

Pengeledahan tersebut merupakan bagian dari

Bersambung ke
Halaman 11

Dasco Pastikan Seluruh Partai Politik Akan Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Pemilu

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Besaran parliamentary threshold (PT) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum ditentukan dalam pertemuan para ketua umum partai politik.

Pertemuan tersebut baru sebatas brainstorming atau tukar pikiran untuk menyiapkan pembahasan RUU Pemilu di DPR.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan

Bersambung ke
Halaman 11



OKNUM KADER PENGUASA 'DIBEKINGI' PEJABAT TERAS AGRINAS

PENGAMAT SOROTI DUGAAN MAFIA DI BALIK PENGELOLAAN KEBUN SAWIT SITAAAN DI RIAU

JAKARTA |
Harian Merdeka

Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menyoroti dugaan adanya praktik mafia dalam pengelolaan kebun ke-

lapa sawit hasil sitaan negara di Riau yang kini berada dalam lingkup pengelolaan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Adib menduga terdapat pihak-pihak yang mengatasna-

man atau memanfaatkan nama oknum pejabat Agrinas untuk mengambil alih kebun sawit milik masyarakat.

Bersambung ke
Halaman 11





Ajak Kampus Kawal RUU Pengendalian Perubahan Iklim, Eddy Soeparno Soroti Karhutla

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Banjarmasin | **Harian Merdeka** - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia harus menjadi alarm serius bahwa krisis iklim semakin nyata dan membutuhkan respons kebijakan yang lebih terintegrasi.

Karhutla dan Krisis Iklim

Hal tersebut disampaikan Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam rangkaian MPR Goes to Campus ke-53 di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut Eddy, kampus memiliki posisi penting untuk ambil bagian dalam memastikan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya ditangani ketika bencana terjadi, tetapi juga melalui kebijakan pencegahan dan mitigasi yang berbasis pada ilmu pengetahuan.

"Kita membutuhkan satu kerangka hukum yang mampu mengintegrasikan upaya mitigasi, adaptasi, pendanaan, data, kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga penegakan hukum dalam menghadapi krisis iklim," tegas Eddy. Eddy menilai Indonesia membutuhkan payung hukum yang dapat memastikan kebijakan iklim berjalan secara terukur, transparan, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"RUU Pengendalian Perubahan Iklim menegaskan tentang peran negara melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim, bagaimana kita mempersiapkan adaptasi, bagaimana pendanaan disiapkan, bagaimana data digunakan, dan bagaimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam menghadapi perubahan iklim," jelasnya. ● (Egi)



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp45,22 triliun.

Dengan tambahan tersebut, total alokasi TKD yang diusulkan DPD RI menjadi Rp780,22 triliun, lebih tinggi dibandingkan angka yang diajukan pemerintah sebesar Rp735 triliun.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengatakan, tambahan anggaran tersebut masih berada dalam rentang alokasi TKD yang sebelumnya ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, kebutuhan tambahan dana tersebut dapat dipenuhi dari belanja cadangan pemerintah pusat yang mencapai Rp616,77 triliun.

"Tambahan Rp45,22 triliun

ini tidak menambah utang dan tidak menambah defisit," kata Ahmad dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Soroti Menyusutnya Porsi TKD

Dorongan penambahan TKD tersebut tidak terlepas dari perhatian DPD RI terhadap semakin kecilnya porsi transfer kepada daerah dalam struktur belanja negara.

Ahmad menyebut, porsi TKD turun dari 28,24 persen pada 2023 menjadi 17,94 persen pada 2027.

Pada periode yang sama, porsi belanja pemerintah pusat justru meningkat dari 71,76 persen menjadi 82,06 persen.

Menurut DPD RI, perubahan komposisi tersebut perlu diperhatikan karena pemerintah daerah masih membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk men-

jalankan pelayanan publik sekaligus membiayai pembangunan.

Selain transfer ke daerah, DPD RI juga menyoroti penurunan belanja modal pemerintah yang dinilai berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam membangun infrastruktur.

"Pemotongan belanja modal membuat belanja infrastruktur saat ini merupakan yang terendah sejak dua dekade terakhir," ujar Ahmad.

Belanja Cadangan Tetap Dibutuhkan

Ahmad menyadari belanja cadangan pemerintah pusat tetap memiliki fungsi penting, terutama untuk menghadapi risiko yang tidak terduga.

Namun, menurut dia, sebagian ruang fiskal tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk memperkuat transfer ke daerah tanpa menambah utang maupun defisit.

● (Agus)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA, Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didi, Daenk, Ali R., Kabirol Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P. Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Prabowo Dorong Pelaku Karhutla Dihukum Berat sebagai Teroris Ekologi

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk kemungkinan menggolongkan tindakan tersebut sebagai “terorisme ekologi”.

Prabowo menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi persoalan serius yang membutuhkan penegakan hukum lebih tegas serta penguatan regulasi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan sejumlah bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan terkini mengenai penanganan karhutla sekaligus langkah mitigasi menghadapi kondisi yang diperkirakan masih rawan dalam satu setengah bulan ke depan.

Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara bersama Menteri Hukum mendalami ketentuan mengenai sanksi terha-

dap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, penguatan aturan dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang dengan melibatkan DPR RI.

“Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius,” jelas Prabowo dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (16/9/2026).

Prabowo menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi mengganggu negara-negara tetangga.

Ia menegaskan pemerintah telah bekerja maksimal untuk melakukan mitigasi dan tidak ingin dampak kebakaran hutan di Indonesia merepotkan negara lain.

“Kita sudah bekerja maksimal untuk mitigasi masalah-masalah ini,” ungkapnya.

Selain penguatan sanksi, Prabowo meminta aturan di daerah yang masih memberi-



kan ruang terhadap pembakaran lahan segera dicabut. Ia juga membuka kemungkinan memperberat ketentuan dalam undang-undang nasional.

“Segera Perda-nya dicabut. Menteri Dalam Negeri dipastikan dan kalau perlu saya katakan kita perberat Undang-Undang Nasional,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh lagi dilakukan dengan alasan apa pun. Pemerintah, kata dia, siap mem-

berikan bantuan apabila masyarakat membutuhkan pembukaan lahan agar pembakaran tidak lagi menjadi pilihan.

“Saya sudah katakan jangan ada alasan rakyat kearifan lokal dan sebagainya, itu saya kira alasan. Saya sudah katakan kalau rakyat butuh kita akan bantu buka lahan. Tapi ini harusnya benar-benar tidak boleh berlanjut. Tidak boleh ada lagi kebakaran hutan untuk buka lahan atau alasan apapun,” ujar Prabowo.

● (Egi)

Draf RUU Ketenagakerjaan Dinilai Cacat Substansi, Buruh Akan Kepung Jakarta

JAKARTA |
Harian Merdeka

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan kekecewaannya terhadap draft Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diperoleh dari DPR RI. Menurutnya, substansi draft tersebut dinilai sangat jauh dari usulan yang sebelumnya diajukan Koalisi Besar buruh.

“Karena itu, teman-teman sekalian, kami akan mencoba terus sampai tanggal 22 September. Itu menjadi batas akhir dari giliran kaum buruh



Indonesia,” ujar Andi Gani saat menyampaikan keterangannya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

Gani juga mengatakan bahwa koalisi buruh telah menunjuk Sunarno,

atau akrab disapa Bung Sunar, sebagai pan-glima aksi koalisi besar. Menurut Gani, apabila hingga tanggal 22 September tidak ada respons dari pemerintah terkait dengan aspirasi buruh, maka salah satu opsi yang akan ditempuh koalisi buruh adalah menggelar aksi besar dengan mengerahkan massa buruh dari berbagai daerah ke Jakarta.

“Kelihatannya pilihan aksi besar masuk ke Jakarta akan menjadi pilihan buat koalisi besar. Dan tentunya kami ingin berharap pemerintah dan DPR untuk segera

merespon,” katanya.

Meski demikian, Gani menyadari pengerahan massa dalam jumlah besar ke Ibu Kota memiliki risiko. Karena itu, menurut dia, selama ini kalangan buruh lebih memilih jalur diplomasi dalam memperjuangkan tuntutannya.

“Kejadian-kejadian beberapa tahun yang lalu membuat kami menempuh jalan diplomasi sekian panjang,” ujarnya.

Gani turut mengungkapkan bahwa para buruh telah memulai aksi di sejumlah daerah. Pada 10 September kemarin, para buruh telah melaku-

kan aksi di 30 kota. Ia juga mengatakan bahwa besok, tepat pada tanggal 17 September 2026, para buruh di Jawa Timur akan melakukan aksi di Gedung Negara Grahadi dan kantor-kantor DPRD.

Jika aksi besar ke Jakarta benar-benar dilakukan, Gani memperkirakan jumlah massa yang datang dapat mencapai puluhan ribu orang.

“Kalau kami prediksi, berapa besar yang akan masuk ke Jakarta bisa mencapai 70 ribuan. Massa buruh bahkan sampai 100 ribu,” kata dia.

● (Egi)



KPK Bongkar Dugaan Suap Summarecon ke ATR/BPN, Ternyata Bukan Pemberian Pertama

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan pemberian uang kepada pihak di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ternyata bukan kali pertama.

Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

“Kami perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini diduga bukan pemberian yang pertama,” kata Budi.

Pernyataan tersebut membuka dimensi baru dalam perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Penyidik kini tidak hanya mendalami transaksi yang menjadi dasar OTT, tetapi juga menelusuri dugaan pemberian sebelumnya.

Diduga Ada Transaksi Sebelum OTT
KPK menduga pernah terjadi pemberian uang sekitar Rp300 juta pada Maret 2026 yang berkaitan dengan proses pengurusan HGB Summarecon. Temuan ini menjadi perhatian karena transaksi tersebut terjadi beberapa bulan sebelum OTT KPK pada September 2026.

KPK juga mendalami dugaan pemberian uang Rp1,5 miliar dalam rangkaian perkara yang kemudian menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta. Penyidik masih menelusuri siapa penerima uang, bagaimana mekanisme pemberian dilakukan, serta untuk kepentingan apa uang tersebut diberikan.

Pengurusan HGB Jadi Titik Persoalan
Perkara ini berkaitan dengan pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Dalam prosesnya, terdapat persoalan terkait lahan yang disebut masih berkaitan dengan sengketa dan pemblokiran.

KPK menduga terdapat komunikasi dan perantara antara pihak perusahaan dengan pihak-pihak yang mempunyai akses ke lingkungan ATR/BPN. ● (Agus)

Usut Korupsi Lahan Hutan PT PSMI, Kejagung Periksa Pejabat Kementerian

JAKARTA |
Harian Merdeka

Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa seorang pegawai Kementerian Kehutanan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI di areal PT Inhutani V Lampung.

“(Memeriksa, red.) seorang pegawai I dari Kementerian Kehutanan periode 2025 sampai dengan saat ini,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari tiga saksi lainnya, yaitu YR dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2014-2018, LSH selaku Dewan Komisaris PT PSMI, dan LPC selaku Direksi PT PSMI.

Anang mengatakan bahwa pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberian dalam perkara korupsi tersebut.

“Proses penyidikan juga

dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” imbuhnya.

Diketahui, penyidik Jampidsus Kejaksaan telah mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi tersebut dari Kejaksaan Tinggi Lampung.

Terkait konstruksi kasus, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar menjelaskan bahwa mulanya PT Inhutani V Lampung mendapatkan izin usaha pengelolaan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 398 Tahun 1996 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri.

Izin tersebut diberikan atas areal seluas lebih kurang 55.157 hektare yang termasuk dalam kategori hutan produksi.

Akan tetapi, kata dia, PT PSMI sejak 2007 secara melawan hukum telah melakukan pengelolaan lahan milik PT Inhutani V di Kabupaten Way Kanan dengan cara melakukan pembukaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dengan membangun

perkebunan tebu seluas lebih kurang 32.375 hektare.

Kemudian, pada tahun 2013, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit dan menemukan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pemanfaatan lahan hutan.

Atas temuan tersebut, Direksi PT PSMI melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pola kemitraan bersama PT Inhutani V Persero.

Nota itu berisi kesepakatan pembangunan hutan tanaman tumpang sari yang memberlakukan perjanjian berlaku surut (backdate) sejak 2007 sampai dengan penandatanganan perjanjian MoU pada tahun 2013.

“Artinya MoU yang ditandatangani di 2013 itu adalah perbuatan melawan hukum karena berlakunya surut sejak tahun 2007,” katanya.

Saiful menekankan, perbuatan PT PSMI yang membuka kawasan hutan dan menguasai lahan serta membangun perkebunan tebu bersama-sama dengan PT Inhutani secara melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. ● (Egi)



Kejagung Lelang 436 Ribu Ton Batu Bara Sitaan Kasus Samin Tan Senilai Rp178 Miliar



JAKARTA |
Harian Merdeka

Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung akan melelang barang sitaan berupa komoditas batu bara sebanyak 436 ribu ton.

Batu bara tersebut merupakan sitaan dari kasus korupsi pengelolaan tambang ilegal di Kalimantan Tengah periode 2016-2025 dengan tersangka taipan Samin Tan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan batu bara akan dilelang dengan harga limit Rp178,8 miliar.

"Batu bara itu merupakan barang sitaan penyidik di kasus korupsi pengelolaan tambang ilegal di Kalimantan Tengah pada periode 2016-2025 oleh Samin Tan," ujar Anang dalam keterangannya, Rabu (16/9).

Anang menjelaskan, batu bara tersebut berada di CHP 1 Stockpile, Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

"Nilai limit yang ditetapkan untuk objek lelang ini adalah sebesar Rp178.873.527.000 dengan besaran uang jaminan penawaran lelang yang

diwajibkan yakni sebesar Rp80.000.000.000," ujarnya.

Lelang akan dilaksanakan dengan metode penawaran terbuka (open bidding) tanpa kehadiran peserta melalui situs resmi <http://www.lelang.go.id>.

Peserta diwajibkan menyetorkan uang jaminan penawaran sebesar Rp80 miliar paling lambat satu hari sebelum batas akhir penawaran.

"Batas akhir penawaran ditetapkan pada hari Rabu, 23 September 2026 pukul 13.00 WIB atau 14.00 WITA. Penetapan pemenang lelang akan dilakukan langsung setelah penawaran ditutup di KPKNL Banjarmasin," tuturnya.

Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor: 162.K/HK.02/MEM.H/2026, kualifikasi peserta lelang dibatasi khusus untuk badan usaha berbadan hukum yang memiliki NPWP.

Selain itu, peserta wajib mencakup pemegang IUP, IUPK, IUPK kelanjutan operasi, PKP2B terintegrasi, pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), maupun pelaku usaha pengguna akhir (end user) batu bara di dalam negeri.

Kasus Samin Tan
Sebelumnya, Kejagung menetapkan taipan Samin Tan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan tambang ilegal oleh PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di wilayah Kalimantan Tengah pada periode 2016-2025.

Samin Tan selaku beneficial owner atau penerima manfaat AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal selama 2017-2025.

Padahal, aktivitas tambang PT AKT telah dicabut melalui Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Namun, aktivitas penambangan ilegal tetap berlanjut karena Samin Tan diduga bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara.

Selain Samin Tan, Kejagung juga menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Handry Sulfian (HS) selaku mantan Kepala KSOP Rangka Ilung, Bagus Jaya Wardhana (BJW) selaku Direktur PT AKT, Helmi Zaidan Mauludin (HZM) selaku General Manager PT OOWL Indonesia, dan MJE selaku pemilik PT Cordelia Bara Utama. ● (Egi)

Menteri Nusron "Menghilang" di Tengah Badai OTT KPK, Dua Kali Mangkir dari Rapat DPR



JAKARTA |
Harian Merdeka

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dua kali tidak menghadiri agenda rapat bersama Komisi II DPR RI.

Ketidakhadiran itu terjadi pada Selasa (15/9/2026) dan kembali terulang pada Rabu (16/9/2026), di tengah kasus dugaan suap di lingkungan ATR/BPN yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam dua agenda tersebut, Nusron diwakili Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Absennya Nusron menjadi sorotan lantaran KPK sebelumnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. KPK sendiri telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Ossy mengatakan kehadirannya dalam rapat bersama DPR merupakan bentuk penugasan dari Nusron. Ia menyebut Menteri ATR/BPN tersebut memiliki sejumlah agenda yang sudah terjadwal.

"Saya hadir di sini kemarin mewakili. Tentunya itu adalah penugasan dari beliau sebagai Menteri ATR BPN. Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan," kata Ossy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Menurut Ossy, agenda dan kegiatan Nusron memang telah tersusun sebelumnya. Karena itu, dirinya ditugaskan untuk menggantikan sang menteri dalam rapat bersama DPR. Namun, ketika ditanya oleh awak media apakah Nusron saat itu berada di Jakarta atau tidak, Ossy tidak memberikan jawaban pasti.

"Artinya beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal. Saya harus cek dengan sekretariat Menteri kalau seperti itu," ujar Ossy.

Meski Nusron tidak terlihat dalam rapat DPR selama dua hari tersebut, Ossy memastikan komunikasi dengan Menteri ATR/BPN tetap berlangsung. Ia menegaskan penugasan yang dijalkannya masih berdasarkan arahan Nusron.

"Masih (komunikasi), Ini kan masih arah beliau semua. Penugasan saya ke sini juga atas arahan beliau. Setiap hari kami terus berkomunikasi karena kan kementeriannya terus di masih dipimpin oleh beliau," ucapnya. ● (Egi)

Profil Summarecon Agung: Dari Raksasa Properti hingga Terseret KPK

JAKARTA | **Harian Merdeka**

PT Summarecon Agung Tbk merupakan perusahaan pengembang properti yang mengembangkan kawasan hunian, komersial, dan fasilitas perkotaan di sejumlah wilayah Indonesia.

Nama perusahaan kembali menjadi perhatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berkaitan dengan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pengusutan tersebut membuat lokasi pengembangan properti perusahaan menjadi salah satu aspek penting untuk ditelusuri.

Sebab, bisnis Summarecon tidak hanya mencakup pembangunan rumah tapak, tetapi juga pengembangan kawasan terpadu yang melibatkan lahan, fasilitas komersial, dan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan laman resmi perusahaan, Summarecon mengelola berbagai proyek pengembangan kota dan bisnis

pendukung di sejumlah wilayah Indonesia.

Perjalanan Summarecon bermula dari pengembangan kawasan Kelapa Gading, Jakarta.

Dalam profil resminya, perusahaan menjelaskan bahwa pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari sejarah bisnisnya dalam membangun lingkungan hunian yang didukung infrastruktur dan fasilitas.

Model pengembangan kawasan kemudian diperluas ke sejumlah wilayah lain, termasuk Serpong, Bekasi, Bandung, Karawang, Bogor, dan Makassar.

Summarecon tidak hanya memasarkan rumah, tetapi juga mengembangkan pusat perbelanjaan, fasilitas rekreasi, dan sarana pendukung kawasan.

Melalui laman resmi grup, Summarecon mencantumkan sejumlah kawasan pengembangan yang dikelola melalui entitas atau merek proyeknya.

-Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara

-Summarecon Serpong,

Tangerang Selatan, Banten

-Summarecon Bekasi, Kota

Klub Kelapa Gading - Kamis, 12 Juni 2025



Bekasi, Jawa Barat

-Summarecon Bandung, Bandung, Jawa Barat

-Summarecon Karawang, Karawang, Jawa Barat

-Summarecon Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan

-Summarecon Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

-Summarecon Crown Gading, Kawasan Jakarta dan sekitarnya

-Summarecon Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten

Daftar tersebut merupakan kawasan yang tercantum dalam laman resmi grup perusahaan.

Tidak seluruh kawasan memiliki karakter pengembangan

yang sama. Sebagian berfokus pada hunian, sedangkan lainnya menggabungkan perumahan, kawasan komersial, dan fasilitas pendukung.

Summarecon juga mencantumkan Samasta Bali dalam daftar situs grupnya.

Samasta Bali berada di kawasan Jimbaran, Bali, dan dikenal sebagai destinasi lifestyle village yang menggabungkan area komersial, kuliner, dan aktivitas rekreasi. Kehadiran Samasta Bali memperlihatkan bahwa portofolio bisnis grup tidak terbatas pada pembangunan perumahan. ● (Egi)

Rekening Donasi Aksi Diblokir Sepihak, AMPB Ancam Terus Unjuk Rasa di Bank Mandiri Pati

PATI |
Harian Merdeka

Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Kantor Bank Mandiri Cabang Pati kembali berlanjut pada Rabu, 16 September 2026. Aksi tersebut merupakan hari kedua dari rangkaian unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung hingga Jumat, 18 September 2026.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, dalam orasinya kembali mempersoalkan pemblokiran rekening miliknya senilai Rp80 juta yang dilakukan sebelum aksi mereka di DPR-RI pada 27 Agustus 2026.

Dalam penyampaian-



nya, Botok turut mempertanyakan alasan rekening dengan nilai triliunan rupiah yang menurutnya berkaitan dengan kasus korupsi tidak diblokir, sementara rekening miliknya yang disebut berasal dari donasi masyarakat justru dikenai pemblokiran.

"Rekening koruptor triliunan kenapa tidak

diblokir. Rekening itu hasil donasi dari masyarakat Indonesia, tetapi Bank Mandiri semena-mena melakukan pemblokiran," ujar Botok dalam orasinya.

Ia menilai tindakan pemblokiran tersebut sebagai bentuk penghalangan terhadap aktivitas dan aspirasi yang hendak disampaikan pihaknya.

Botok bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi. "Ini adalah bentuk penghalangan, ini adalah intimidasi," tegasnya.

Botok mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan dasar dan regulasi yang digunakan dalam pemblokiran rekening tersebut. Hal itu akan menjadi salah satu poin yang dibahas dalam audiensi dengan pihak Bank Mandiri.

"Nanti kita tanyakan regulasi terkait pemblokiran tersebut. Kita lihat hasil audiensi," katanya. Ia menegaskan, AMPB akan tetap melanjutkan perjuangan mereka dalam menyampaikan aspirasi terkait persoalan

tersebut. Menurutnya, pihaknya tidak akan mundur meskipun terdapat pihak yang dianggap menghalangi aksi mereka.

"Siapa pun yang menghalangi kami, terkait aspirasi kami tidak akan mundur," tegas Botok.

Aksi AMPB di Bank Mandiri Cabang Pati sendiri dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai Selasa 15 September hingga Jumat 18 September 2026. Massa meminta adanya penjelasan mengenai dasar pemblokiran rekening serta menuntut persoalan tersebut dibuka secara transparan melalui proses audiensi.

● (Egi)

Kapolda Metro Jaya Luncurkan Program 'Bapak-Ibu Asuh dan Sahabat Pelajar'



JAKARTA |
Harian Merdeka

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri menggagas program 'Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar'. Program tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan Polri dengan pelajar.

Program tersebut diluncurkan oleh Kapolda Metro Jaya di gedung Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala sekolah se-DKI Jakarta serta para pejabat utama (PJU) Polda Metro Jaya.

Melalui Program 'Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar', personel kepolisian diarahkan hadir lebih dekat dengan siswa melalui pendampingan, pembinaan, dan komunikasi yang berkelanjutan. Kehadiran tersebut tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi ditujukan untuk membangun kedekatan agar pelajar memiliki ruang yang aman untuk bertanya, bercerita, dan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

"Yang kita bangun melalui program ini adalah sistem pencegahan sejak dini agar anak-anak kita tidak masuk situasi yang bisa merugikan masa depannya," kata Komjen Asep Edi Suheri, dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Gagasan tersebut menjadi

bagian dari tindak lanjut Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat Sekolah (FKPMS) yang telah diluncurkan Kapolda Metro Jaya pada 11 Maret 2026. FKPMS sebelumnya dikembangkan di 11 sekolah di Jakarta sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam melakukan deteksi dini serta menangani berbagai persoalan di lingkungan pendidikan.

Keamanan dalam ruang belajar maupun lingkungan sekolah merupakan hak mendasar setiap anak. Anak-anak juga membutuhkan sosok yang mau mendengar, memahami persoalan mereka, serta membantu ketika menghadapi ajakan atau pengaruh yang dapat merugikan masa depannya.

Bagi para pelajar, program ini diharapkan menghadirkan polisi sebagai sahabat yang dapat dipercaya. Personel akan memberikan pemahaman mengenai risiko berbagai tindakan yang melanggar hukum sekaligus membantu siswa menghadapi tekanan, ajakan, ataupun pengaruh yang berpotensi membawa mereka ke dalam situasi yang merugikan.

Komjen Asep menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelajar tidak dapat dijalankan oleh kepolisian

sendiri. Karena itu, personel diminta memahami karakter lingkungan sekolah, mengenali dinamika yang dihadapi siswa, serta membangun komunikasi yang baik dengan guru dan orang tua.

Orang tua dan sekolah juga menjadi bagian penting dalam pola pendampingan tersebut. Komunikasi yang terbuka diharapkan membantu setiap persoalan dikenali lebih awal sehingga dapat ditangani bersama sebelum berkembang lebih jauh.

Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat tujuan FKPMS dalam membangun sistem pencegahan terhadap berbagai persoalan di lingkungan pendidikan, termasuk perundungan, kekerasan, tawuran, pengaruh negatif media sosial, serta persoalan lain yang dapat mengganggu keamanan dan perkembangan pelajar.

Melalui Program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar, Polda Metro Jaya mendorong terbangunnya kemitraan yang lebih erat antara kepolisian, sekolah, orang tua, dan siswa. Polisi diharapkan hadir bukan sebagai sosok yang ditakuti, melainkan sebagai pihak yang dapat dipercaya, mau mendengar, dan membantu pelajar ketika menghadapi persoalan yang dapat merugikan masa depannya.

● (Egi)



Kepala BNN dan Kasad Jenderal Maruli Perkuat Kolaborasi Berantas Narkoba

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Gebrakan bersama BNN dan TNI AD kini resmi diperkuat guna memberantas peredaran barang haram di seluruh wilayah Indonesia. Langkah besar ini ditandai dengan dilaksanakannya pertemuan tingkat tinggi antara kedua lembaga negara tersebut.

Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto memimpin langsung rombongan pejabat dalam kunjungan kerja tersebut. Beliau didampingi oleh sejumlah Pejabat Tinggi Madya serta Pejabat Pratama dari lingkungan BNN RI. Pertemuan strategis ini diselenggarakan pada Rabu, 16 September 2026. Lokasi audiensi bertempat di Markas Besar TNI Angkatan Darat atau Mabes AD yang berlokasi di Jakarta Pusat.

Kedatangan pimpinan BNN RI disambut hangat oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kedua tokoh penting ini duduk bersama membahas langkah nyata penanganan narkotika.

Audiensi ini menjadi momentum yang sangat krusial bagi kedua instansi. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman peredaran gelap narkoba.

Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kasad beserta jajaran TNI Angkatan Darat. Pihak TNI AD dinilai konsisten memberikan dukungan penuh terhadap program pencegahan narkoba.

Kerja sama ini difokuskan pada penguatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN. Sinergi ini diharapkan menjadi pukulan telak bagi para pelaku kejahatan narkotika.

Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa masalah narkotika sudah masuk dalam kategori ancaman amat serius. Penanganan kasus ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri.

Pimpinan BNN menekankan pentingnya penanganan yang terpadu dan berkelanjutan. Upaya penyelamatan generasi bangsa wajib melibatkan seluruh elemen dan komponen kekuatan negara. ● (Egi)

Jessica Mila Rahasiakan Anak Kedua

JAKARTA |
Harian Merdeka

Pasangan selebritas Jessica Mila dan Yakup Hasibuan tengah diselimuti kebahagiaan. Keduanya baru saja mengumumkan kabar gembira bahwa mereka sedang menantikan kelahiran anak kedua.

Yakup mengungkapkan, ia dan Jessica sebenarnya sudah mengetahui kehamilan tersebut sejak dua bulan lalu saat usia kandungan sang istri masih sekitar enam minggu.

“Ya mungkin kita baru berani announce sekarang gitu. Ya bersyukur aja bahwa udah dikasih lagi sama Tuhan buat dikasih kepercayaan buat anak kedua ini. Dari Mila-nya sama kita juga memang cukup menunggu, ternyata dikasih Tuhan,” kata Yakup Hasibuan dalam wawancara daring, Selasa (15/9/2026) malam.

Kabar bahagia tersebut pertama kali disampaikan Jessica saat Yakup pulang kerja. Momen itu menjadi kejutan manis bagi sang suami di tengah rasa lelahnya.

“Dia ngasih tahu pertama kali ke saya memang. Jadi awal-awal belum ada symptoms sih ya. Jadi memang benar-benar kaget banget, pas dia ngasih tahu, pulang ker-

ja, lagi capek-capek, eh santai-santai, eh tiba-tiba dia ngasih tahu itu. Ya kaget banget, kaget banget. Eh ya bersyukur banget lah gitu,” ujarnya.

Mengenai jenis kelamin calon buah hati, Yakup mengaku tidak memiliki harapan khusus. Keduanya sepakat menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Tuhan.

Bahkan, pasangan ini sengaja meminta dokter kandungan untuk merahasiakan jenis kelamin calon bayi mereka demi kejutan di acara gender reveal. Menurut Yakup, acara tersebut nantinya bukan hanya menjadi kejutan bagi keluarga dan orang-orang terdekat, tetapi juga bagi dirinya dan Jessica.

“Jadi nanti surprise buat orang-orang, buat keluarga, tapi buat kami juga. Karena saya sendiri jujur belum tahu gender-nya apa. Tapi apa pun yang dikasih Tuhan, kita yakin itu yang terbaik,” lanjutnya.

Yakup merencanakan menggelar gender reveal dalam waktu dekat. Namun, pelaksanaannya masih menunggu penyesuaian jadwal dengan keluarga besar.

Kehadiran calon anak kedua Jessica dan Yakup ini sekaligus akan menambah jajaran cucu di keluarga besar Hasibuan. Ayah Yakup, pengacara kondang Otto Hasibuan, siap menyambut cucu ketujuhannya.

“Opungnya nanti bisa ditanyain langsung, tapi kalau dari pengamatan saya sih cukup pasti happy-lah ya, pasti bersukacita.

Ini akan menjadi cucu perempuan ketiga, berarti.

Kalau laki-laki, akan laki-laki ke satu, dua, tiga, empat. Jadi ini akan cucu ke... total keseluruhan, cucu ke tujuh,” pungkasnya. **(dth)**

ih



PKB Nilai Ambang Batas Parlemen 5 Persen Proporsional

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin menilai ambang batas parlemen sebesar 5 persen merupakan angka yang proporsional dan relevan untuk diterapkan.

“PKB sejak awal melihat bahwa 5 persen sebagai angka yang proporsional dan relevan untuk ambang batas parlemen,” kata Khozin saat dihubungi, Rabu (16/9).

Ia menjelaskan besaran 5 persen tetap menjaga proporsionalitas keterwakilan politik masyarakat di parlemen.

Angka itu juga sekaligus mendorong penyederhanaan sistem kepartaian agar lebih efektif, sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Khozin mengatakan PKB membuka ruang pembahasan bersama besaran ambang batas itu dalam penyusunan RUU Pemilu.

“Jadi, angka 5 persen merupakan pandangan PKB dalam melihat desain sistem pemilu yang ideal, dengan tetap membuka ruang pembahasan bersama dalam proses penyusunan RUU Pemilu,” ujarnya.

Angka 5 persen sebelumnya juga disebut disepakati oleh Golkar dan PKS. Kedua pimpinan partai itu sebelumnya bertemu di Kantor DPP Golkar, Senin (14/9).

Pertemuan turut membahas RUU Pemilu yang saat ini masih dalam proses penyerapan aspirasi di Komisi II DPR.

“Misal tentang parliamentary threshold. Kita bersepaham di angka yang moderat saja, kira-kira 5 persen,” ujar Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji saat dikonfirmasi, Selasa (15/9). ● (Egi)



Rieke Diah Pitaloka Desak Anggaran Mandiri untuk Komnas Perempuan



JAKARTA |
Harian Merdeka

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong kemandirian anggaran Komnas Perempuan agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi perlindungan dan pendampingan korban kekerasan secara optimal. Menurutnya, dukungan anggaran merupakan bagian penting dari komitmen negara terhadap pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kami serius memperjuangkan, karena kami tidak ingin kegagalan perjuangan politik anggaran bagi isu HAM itu adalah kegagalan kami juga di Komisi XIII. Keputusan anggaran ini tidak satu-satunya di Komisi XIII, ada Banggar, Bappenas, dan Kementerian Keuangan,” ujar Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama BPPIP,

Komnas HAM, dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Rieke menyoroti kondisi Komnas Perempuan yang masih berbagi pagu anggaran dan satuan kerja (satker) dengan Komnas HAM. Karena itu, ia mendorong agar Komnas Perempuan tidak hanya memiliki satker mandiri, tetapi juga memperoleh Bagian Anggaran (BA) yang mandiri dengan alokasi anggaran yang terpisah.

“Mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan yang baru, perspektif HAM-nya lebih kuat. Perjuangan ini supaya Komnas Perempuan bukan hanya jadi satker mandiri, tetapi juga Bagian Anggaran yang mandiri, anggarannya terpisah,” tegas Rieke.

Ia juga meminta kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, memperkuat perspektif

HAM dalam penyusunan alokasi APBN. Menurutnya, kejelasan dan kemandirian anggaran diperlukan untuk mendukung pelayanan pengaduan serta pendampingan terhadap korban kekerasan. Dalam rapat tersebut, Komisi XIII juga menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Dengan tambahan tersebut, pagu anggaran kedua lembaga pada Tahun Anggaran 2027 meningkat dari semula Rp133,54 miliar menjadi Rp158,54 miliar. Rieke juga mengimbau aktivis dan masyarakat sipil untuk terus mengawal proses pembahasan anggaran. Ia menegaskan, pengawasan tersebut penting agar alokasi anggaran bagi lembaga HAM dapat mendukung pelaksanaan program dan fungsi perlindungan masyarakat secara optimal.

● (Egi)

CIBINONG |
Harian Merdeka

Kasus dugaan korupsi Upah Pungut Pajak (UPP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta mutasi pejabat, terus menjadi perhatian publik. Warga Kabupaten Bogor mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak ragu menetapkan para tersangka dalam kasus tersebut.

Sejak kasus ini bergulir pada Kamis (20/8/2026), KPK telah menyita uang Rp1,5 miliar, memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Bogor ke Gedung Merah Putih, melakukan gelar perkara, dan penggeledahan Kantor Bappenda, BKSDM, dan Disdik. Hingga hari ini Rabu (16/9/2026), KPK masih menerapkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum dan belum menetapkan tersangka.

“Sampai hari ini belum ada tersangkanya. Ada apa ini? KPK jangan ragu-ragu, segera tetapkan tersangkanya. Termasuk memanggil Bupati Bogor dan jika terbukti terlibat juga harus ditindak. Hukum jangan hanya tumpul ke bawah. Jangan sampai KPK diisukan masuk angin dan diintervensi,” kata Ketua Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) Oman Rohman Pribadi alias Opri dalam per-

Darurat Rasuah Pemkab Bogor: Warga Desak KPK Segera Umumkan Tersangka



nyataan tertulis yang diterima iNews.id, Rabu (16/9/2026).

Anggota PMBB perwakilan warga Bogor Selatan, Azet Basuni, menegaskan bahwa Kabupaten Bogor sebagai halaman rumah Presiden RI Prabowo Subianto seharusnya bersih dari praktik tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Oleh karenanya penyidik KPK jangan membiarkan para koruptor ini tetap bergentayangan di Bumi Tegar Beriman. Sikat semua yang terlibat tanpa pandang bulu,” tutur Azet.

Azet menegaskan, masyarakat dan para pegawai saat ini dalam kondisi tidak nyaman karena para koruptor masih gentayangan di Kabupaten Bogor.

Ia mengungkapkan pula sikap pesimistis masyarakat dengan merebaknya kasus korupsi di Kabupaten Bogor sehingga malas membayar pajak.

“Penyidik KPK harus segera tetapkan tersangka, kalau belum, kami enggan membayar pajak dan kami siap people power. Ini fakta. Berdasarkan pengakuan sejumlah petugas

pemungut pajak di tingkat desa, mereka mengaku selama ini juga dipotong upah pungutnya sebesar Rp50.000. Tidak ada penjelasan untuk apa pemotongan itu. Mereka juga bingung,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyo buka suara merespons peluang dipanggilnya Bupati Bogor, Rudy Susmanto untuk diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kata Setyo, pemanggilan Bupati masih menunggu proses penyidikan.

Menurut Setyo, penyidik biasanya akan memanggil dulu pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam proses penyidikan.

“Pemanggilan itu kan pasti ada tahapnya, ya ada prosesnya. Kalau saat ini tentu kan yang dipanggil beberapa pihak yang paling berkaitan langsung,” kata Setyo kepada wartawan, Selasa (1/9/2026). ● (Egi)

28 Gudang di Tangerang Terbakar Akibat Terlambat Lapor Damkar



TANGERANG |
Harian Merdeka

Sebanyak 28 bangunan di kawasan Pergudangan Kosambi Permai, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut.

tiwa tersebut.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mengatakan petugas masih melakukan pemadaman dan mencegah api merambat ke bangunan lain. “Iya sudah 28 gudang dan saat ini masih dalam penanganan,” ujarnya, Rabu, 16 September

2026.

Taufik menyebut beberapa bangunan gudang yang terbakar sudah mengalami keruntuhan konstruksi. Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi (Pusdal Ops) BPBD Kabupaten Tangerang, api diduga berasal dari gudang spring bed di kawasan tersebut.

Menurut Taufik, api dapat menjalar ke puluhan gudang karena laporan kebakaran terlambat disampaikan ke pos damkar BPBD terdekat. “Mereka melaporkannya terlambat ke Pos Kosambi atau ke Pusdalops,” ucap Taufik.

BPBD mengerahkan 30 personel dan enam armada pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran tersebut. Selain itu, dua unit armada dari otoritas Bandara Soekarno-Hatta turut

memberikan perbantuan.

Hingga saat ini, proses pemadaman masih berlangsung. Taufik menegaskan tidak ada korban jiwa maupun luka, meski kebakaran sempat menimbulkan kepanikan warga di kawasan tersebut.

Terpisah, Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan menyatakan kebakaran terjadi di sekitar area luar Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Ia memastikan operasional Bandara Soetta tetap berjalan normal.

Situasi di lokasi kejadian telah ditangani secara intensif oleh pihak terkait, meski asap hitam tebal sempat membubung. “Keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama,” katanya. ● (Egi)

BONGKAR KASUS

penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu lokasi yang digeledah adalah ruangan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.

"Pengeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR/BPN, salah satunya ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN," kata Budi kepada wartawan, Kamis (17/9).

Menurut Budi, proses pengeledahan masih berlangsung. Penyidik melakukan langkah tersebut untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT).

"Kegiatan pengeledahan tersebut dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi

alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini," ujarnya.

KPK belum membeberkan barang bukti apa saja yang ditemukan dari pengeledahan tersebut. Lembaga antirasuah menyatakan perkembangan hasil pengeledahan akan disampaikan sebagai bagian dari transparansi proses hukum.

Mengarah ke Struktur Pengurusan HGB

Kasus ini bermula dari OTT KPK yang mengungkap dugaan pemberian uang berkaitan dengan pengurusan HGB Summarecon di Bogor.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga mendalami alur perintah serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses pengurusan tersebut.

Sebelumnya, KPK mengungkap adanya dugaan pemberian uang kepada pihak di lingkungan ATR/BPN. Penyidik juga menemukan informasi mengenai dugaan pemberian uang

dalam perkara serupa pada periode sebelumnya.

Pengeledahan di lingkungan kementerian menjadi langkah penting bagi penyidik untuk mencocokkan keterangan para pihak yang telah diperiksa dengan dokumen, komunikasi, maupun bukti administrasi yang berkaitan dengan proses HGB.

Namun, sampai saat ini belum ada keterangan resmi KPK yang menyimpulkan keterlibatan pejabat tertentu di luar pihak yang telah ditetapkan atau disebut dalam perkara.

Bukti Administrasi Jadi Perhatian

Dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan pertanahan, dokumen administrasi dapat menjadi bagian penting untuk menelusuri bagaimana sebuah permohonan diproses, siapa yang menangani, serta pada tahap mana dugaan pemberian uang terjadi.

Karena itu, pengeledahan di ruangan pejabat terkait dapat

memberikan bahan bagi penyidik untuk membandingkan prosedur formal dengan fakta yang ditemukan dalam penyidikan.

KPK masih memiliki sejumlah tahapan penyidikan sebelum perkara dibawa ke persidangan. Bukti-bukti hasil pengeledahan nantinya akan dinilai bersama alat bukti lainnya.

Kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada pihak yang tertangkap dalam OTT. Penelusuran dapat berkembang ke proses administrasi, alur komunikasi, serta pihak lain yang diduga mengetahui atau memiliki peran dalam perkara.

KPK sendiri belum menyampaikannya secara keseluruhan hasil pengeledahan di Kementerian ATR/BPN. Publik masih menunggu apakah penyidik menemukan dokumen atau barang bukti lain yang dapat memperjelas konstruksi dugaan suap pengurusan HGB Summarecon tersebut.

● (Agus)

DASCO PASTIKAN

bahwa pembahasan antarpol ini masih berada pada tahap awal dan akan terus berlanjut mengikuti dinamika di parlemen.

"Jadi pertemuan para ketum parpol itu hanya baru brainstorming mengenai persiapan pembahasan Undang-Undang Pemilu yang akan dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR," kata Dasco, Kamis, 17 September 2026.

Dasco menegaskan, sesi tukar

pikiran tersebut belum menghasilkan keputusan apa pun mengenai angka ambang batas parlemen, termasuk angka 5 persen yang sempat mencuat sebelumnya.

"Jadi kalau brainstorming itu kan belum ada penentuan. Jadi hasil diskusi-diskusi itu kira-kira ya antara lain seperti yang disampaikan Pak Sugiono itu," ujarnya.

Menurut Dasco, proses pembahasan RUU Pemilu masih

panjang, sehingga pertemuan lanjutan antarpimpinan partai politik masih sangat terbuka untuk dilakukan.

"Ya kan ini pembahasannya masih akan panjang. Nah tentunya brainstorming-brainstorming lanjutan akan terus ada mengikuti dinamika yang ada di pembahasan nanti tentunya," kata dia.

Selain merangkum pandangan antarpol, Dasco menyebut pihaknya juga tengah menanti

hasil partisipasi publik yang dihimpun oleh Komisi II DPR sebagai bagian dari proses pra-pembahasan RUU Pemilu.

Menanggapi adanya partai politik yang tidak hadir dalam pertemuan sebelumnya, Dasco memastikan bahwa seluruh parpol tanpa terkecuali akan dilibatkan dalam tahap pembahasan lanjutan.

"Ya nanti kita akan undang semua," tegas Dasco.

● (Egi)

PENGAMAT SOROTI

"Diduga mafia di PT Agrinas Palma Nusantara menjadi kaki tangan oknum pejabat Agrinas untuk merampok kebun-kebun sawit hasil sitaan dan menjual-jual nama Prabowo di Riau," ujar Adib kepada Harian Merdeka, Kamis (17/9).

Menurut dia, dugaan praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan pengaruh oknum pejabat serta melibatkan oknum aparat. Pemilik kebun disebut diduga mendapat tekanan agar menyerahkan lahan yang dikelolanya.

Adib menyebut, dalam dugaan praktik tersebut, pihak-pihak tertentu bahkan diduga telah

menikmati hasil produksi kebun sebelum proses pengambilalihan secara resmi dilakukan dan lahan tersebut berada di bawah pengelolaan Agrinas.

"Dengan ada oknum kader Penguasa berinisial P dengan restu oknum pejabat Agrinas berinisial C dan menggunakan oknum aparat, mereka memaksa pemilik kebun sawit untuk menyerahkan lahan, lalu menikmati hasil produksi sebelum resmi diambil alih menjadi lahan di bawah pengelolaan Agrinas," katanya.

PT Agrinas Palma Nusantara memang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola

lahan hasil penguasaan kembali negara. Pada Mei 2026, perusahaan menyatakan menerima tambahan 2,37 juta hektare lahan negara sehingga total kawasan yang dipercayakan kepada Agrinas mencapai sekitar 4,12 juta hektare.

Di Riau, Agrinas juga telah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat terkait pengelolaan perkebunan serta pengembangan pola kemitraan berbasis koperasi.

Namun, tuduhan Adib terkait adanya mafia, pemaksaan terhadap pemilik kebun, penggunaan nama Presiden Prabowo,

serta keterlibatan oknum aparat tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani saat dikonfirmasi melalui saluran telepon mengenai tuduhan tersebut belum memberikan tanggapan.

Agrinas sendiri menyatakan komitmennya menjalankan pengelolaan perkebunan dengan tata kelola yang transparan dan profesional serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

● (Egi/hmi)

Marc Marquez 'Sang Makhluk Mars'

JAKARTA |
Harian Merdeka

Dalam dua seri terakhir MotoGP 2027, Marc Marquez sukses sapu bersih poin maksimal. Penampilan rider Ducati itu membuat pengamat MotoGP Carlo Pernat menyebutnya seperti makhluk dari Mars.

Marquez menyapu bersih MotoGP San Marino di Misano. Ia meraih kemenangan pada Sprint Race dan balapan utama sehingga mengamankan 37 poin dalam satu akhir pekan.

Hasil tersebut melanjutkan performa apik Marquez pada seri sebelumnya, ketika meraih 37 poin di MotoGP Aragon. Artinya, Marc mengumpulkan 74 poin maksimal dalam dua seri beruntun.

Bagi Pernat, yang membuat Marquez berbeda bukan sekadar kecepatannya. Gaya balap rider asal Spanyol itu dinilai sudah berubah seiring bertambahnya usia dan pengalaman.

Pernat menilai Marquez kini

lebih mampu mengendalikan situasi balapan dibandingkan beberapa tahun lalu, tidak lagi terlalu sering mengambil risiko hingga berujung crash. Ia lebih baik dalam membaca kondisi dan mengelola balapan.

"Marquez adalah makhluk Mars. Bahkan seiring bertambahnya usia, dengan semua masalah yang pernah dia alami, dia mampu mengelola balapan dengan cara yang tidak bisa dilakukan pebalap lain," ucapnya seperti dilansir Motosan.

"Kita selalu bersulang untuk Marquez. Dalam beberapa Grand Prix terakhir, kita selalu bersulang untuknya, sekarang sudah dua kali berturut-turut. Jika dia adalah Marquez empat atau lima tahun lalu, saya akan mengatakan tidak ada yang seperti dia dalam hal cara dia membalap, meskipun terkadang dia terjatuh."

"Sekarang, gaya balapnya juga sudah berubah: dia tidak lagi terjatuh, dia mengelola situasi yang dihadapinya. Karena waktu terus berjalan, dia pernah mengalami masalah pada bahu, tetapi dia mampu mengatasi semuanya. Dan dia mengelolanya dengan sangat baik sampai-sampai, dalam tanda kutip, dia membuat pebalap lain terjatuh. Bukan karena dia mendorong mereka, tentu saja."

Pernyataan Pernat tersebut muncul setelah Marquez tampil dominan di Misano. Ia berhasil mengambil alih posisi terdepan setelah Marco Bezzecchi terjatuh dan kemudian menahan tekanan Jorge Martin sebelum meraih kemenangan.

Marc Marquez kini berada di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 274 poin, sama dengan Jorge Martin tetapi unggul jumlah kemenangan. Kemenangan di Misano menjadi kemenangan GP kelimanya dalam tujuh balapan terakhir. ● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN **MERDEKA**
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya Rp30.000/bulan Hubungin Alan Oskar : +62 895-2285-1963